



MEMBANGUN GEREJA SEBAGAI GERAKAN YANG CERDAS DAN SOLIDER

**Apresiasi Terhadap Kegembalaan
Ignatius Kardinal Suharyo**

MEMBANGUN GEREJA SEBAGAI GERAKAN YANG CERDAS DAN SOLIDER

**Apresiasi Terhadap Kegembalaan
Ignatius Kardinal Suharyo**

Editor:
Fransiskus Purwanto, SCJ
Agustinus Tri Edy Warsono, Pr



Sanata Dharma University Press

Membangun Gereja sebagai Gerakan yang Cerdas dan Solider

Copyright © 2020

Fakultas Teologi USD

Tim Penulis:

- Ignatius Kardinal Suharyo
- Johannes Eka Priyatma
- Bernhard Kieser, SJ
- Johannes Baptista Banawiratma
- Mgr. Adrianus Sunarko, OFM
- Emanuel Martasudjita, Pr
- Vincentius Indra Sanjaya Tanureja, Pr
- Izak Y. M. Lattu
- Mgr. Antonius Bunjamin Subianto, OSC
- Yohannes Berchmans Sigit Hutomo
- Aloys Budi Purnomo, Pr
- Yohanes Gunawan, Pr
- Mgr. Robertus Rubiyatmoko
- Albertus Bagus Laksana, SJ
- Johannes Robini Marianto, OP
- Martin Chen, Pr
- Alexius Andang L. Binawan, SJ
- Josef M. N. Hehanussa
- Simon Petrus L. Tjahjadi, Pr
- Syafa'atun Almirzanah
- Gregorius Sri Nurhartanto
- Veronica Kusdiartini
- Francisia SSE Seda
- Theodorus Wiryawan

Editor:

- Fransiskus Purwanto, SCJ,
- Agustinus Tri Edy Warsono, Pr

Desainer sampul : Mischa Sekarpandya

Penata letak : Yohanes Dwiko

Ilustrasi sampul dan sumber foto:

Arsip sekretariat Keuskupan Agung Jakarta



Diterbitkan oleh:

SANATA DHARMA UNIVERSITY PRESS

Lantai 1 Gedung Perpustakaan USD

Jl. Affandi (Gejayan) Mrican

Yogyakarta 55281

Tel.: (0274) 513301, 515253;

Ext. 51513, Fax (0274) 562383

Website: www.usdpress.usd.ac.id

Email: publisher@usd.ac.id

Anggota APPTI: 003.028.1.03.2018

Institusi Pendukung & Penyelenggara:

FAKULTAS TEOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jl. Kaliurang Km 7, Yogyakarta

Buku Cetak:

ISBN 978-623-7379-74-4

EAN 978-623-7379-73-7

Cetakan pertama: November 2020

xiv + 289 hlm; 17.6 cm x 25 cm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	v
FRANSISKUS PURWANTO, SCJ - AGUSTINUS TRI EDY WARSONO, PR	
Sambutan Rektor Universitas Sanata Dharma: Gereja Katolik dan Tantangan Hidup Bernegara	xi
JOHANES EKA PRIYATMA	
Sambutan Dekan Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma: Keterlibatan yang Berbuah Lebat bagi Gereja Indonesia	xiii
ALBERTUS BAGUS LAKSANA, SJ	

BAGIAN SATU IGNATIUS KARDINAL SUHARYO

<i>Curriculum Vitae</i>	3
Daftar Karya Ilmiah Ignatius Kardinal Suharyo	4
Gereja sebagai Paguyuban dan Gerakan, Berbagi Gagasan Keuskupan Agung Jakarta	17
MGR. IGNATIUS KARDINAL SUHARYO	

BAGIAN DUA TEOLOGI

1. Bagaimana Yesus Menghendaki Jemaat-Nya?	27
BERNHARD KIESER, SJ	
2. Gerakan Yesus dalam Konteks Politik, Budaya-Agama, dan Ekonomi	33
JOHANNES BAPTISTA BANAWIRATMA	
3. Teologi Belarasa dan Harapan akan Perdamaian (Refleksi Teologis)	47
MGR. ADRIANUS SUNARKO, OFM	
4. Menghayati Kehadiran Kristus dalam Misa secara <i>Live Streaming</i>	63
EMANUEL MARTASUDJITA, PR	
5. Surat Ibrani dan Keimanan Ganda? Sebuah Usaha Memahami Surat Ibrani	77
VINCENTIUS INDRA SANJAYA TANUREJA, PR	
6. Teologi Tanpa Tinta: Mencari <i>Logos</i> Melalui Etnografi dan <i>Folklore</i>	89
IZAK Y. M. LATTU	

BAGIAN TIGA PASTORAL

7. Integritas Ignatius Kardinal Suharyo Harmoni antara Identitas dan Aktivitas	103
MGR. ANTONIUS SUBIANTO BUNJAMIN, OSC	
8. Kepemimpinan Pastoral yang Apresiatif	115
YOHANNES BERCHMANS SIGIT HUTOMO	
9. Inspirasi Kepemimpinan Ekoteologis Interreligius Ignatius Kardinal Suharyo	121
ALOYS BUDI PURNOMO, PR	

10.	Kepemimpinan Ignatius Kardinal Suharyo: Kitab Suci di Tangan Kanan, Koran di Tangan Kiri	131
	YOHANES GUNAWAN, PR	

BAGIAN EMPAT EKLESIOLOGI - EKUMENE

11.	Gereja sebagai Paguyuban yang Selalu Membarui Diri	149
	MGR. ROBERTUS RUBIYATMOKO	
12.	Sekolah Hasrat: Tantangan Gereja di Masyarakat Urban Kontemporer	157
	ALBERTUS BAGUS LAKSANA, SJ	
13.	Berdialog dan Misi dalam Konteks Asia	169
	JOHANES ROBINI MARIANTO, OP	
14.	Gereja sebagai <i>Communio</i> Transformatif	175
	MARTIN CHEN, PR	
15.	Wajah <i>Chaordic</i> Gereja Katolik dalam Hukum Kanonik	189
	ALEXIUS ANDANG L. BINAWAN, SJ	
16.	Gereja sebagai Paguyuban Ekumenis	203
	JOZEF M. N. HEHANUSSA	
17.	Katolik Zaman Pendudukan Jepang Paguyuban dan Gerakan Umat Allah di Masa Sulit 1942-1945	215
	SIMON PETRUS L. TIAHJADI, PR	
18.	Keadilan dan Keberpihakan kepada Kaum "Miskin" (Perspektif Teologi Pembebasan Qur'anik)	229
	SYAFA'ATUN ALMIRZANAH	

BAGIAN LIMA ILMU SOSIAL

19.	Ignatius Kardinal Suharyo: Kontribusi Pemikirannya bagi Kehidupan Gereja dan Masyarakat di Indonesia dalam Perspektif Hukum	245
	GREGORIUS SRI NURHARTANTO	
20.	<i>Entrepreneur</i> Beretika Kristiani Masa Depan Gereja Katolik Indonesia	255
	VERONICA KUSDIARTINI	
21.	Sendiri Bersama-sama: Suatu Perubahan Sosial Menuju Masyarakat Baru	267
	FRANCISIA SSE SEDA	
22.	Berakhir di Awal, Berawal di Akhir	277
	THEODORUS WIRYAWAN	
	Para Kontributor	283

KATOLIK ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG PAGUYUBAN DAN GERAKAN UMAT ALLAH DI MASA SULIT 1942-1945

Simon Petrus L. Tjahjadi, Pr

MGR. SUHARYO meyakini, hakikat Gereja adalah paguyuban dan gerakan umat Allah. Paham ini menekankan segi dinamis dari hidup Gereja. Namun dari bentangan perjalanan Gereja Katolik di Indonesia adakah salah satu fase di dalam sejarahnya, yang menunjukkan kepada kita Gereja sebagai “paguyuban dan gerakan umat Allah” itu? Dalam tulisan ini, saya mau memperlihatkan bahwa secara aktual Gereja sebagai paguyuban dan gerakan umat Allah di Indonesia itu bisa kita temukan pada hidup Gereja Katolik di masa pendudukan Jepang (1942-1945).

Pesan intinya adalah meskipun mengalami aneka pembatasan dan tekanan, Gereja Katolik Indonesia pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) telah tampil sebagai sosok Gereja-pribumi yang kuat dan liat, tanpa bantuan Barat. Tokoh-tokoh utamanya adalah umat, bukan figur imamat atau tarekat. Ia adalah Gereja pribumi yang percaya diri, menanggung segala ujian, dan kelak menjadi inspirasi dan referensi saat 1970-an terjadi diskusi tentang Indonesianisasi di bumi pertiwi.

Tulisan ini akan dibagi ke dalam empat bagian. Bagian *pertama* memuat narasi singkat-padat mengenai perjalanan dinamis Gereja hingga kedatangan Jepang di Indonesia, 1942. Bagian *kedua* berisi tentang pendudukan Jepang pada umumnya, dan sikap mereka terhadap agama pada khususnya sebagai konteks untuk bagian *ketiga* yang mengisahkan tentang keadaan Gereja di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Bagian *keempat* merupakan bagian penutup dengan sebuah refleksi atas narasi kisah ini.

Misi Katolik hingga 1942

Secara historis, kelahiran Gereja Katolik di kalangan penduduk Nusantara ini mulai dengan pembaptisan umat di desa Mamuya, dekat Tobelo sekarang (Halmahera Utara), oleh seorang imam praja Portugis, RD Simon Vaz, atas undangan seorang pedagang dan “katekis amatir” bernama Gonsalves Veloso, pada 1534, tahun yang dianggap awal dari perkembangan Gereja Katolik di Indonesia.¹ Dalam kelanjutannya, baptisan pertama itu disusul baptisan lain, sehingga jumlah orang yang dibaptis selama Rm. Vaz berkarya di sana terhitung sekitar 3.000 jiwa.

Namun, karya Rm. Vaz tidak berlangsung lama. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi peperangan antara kesultanan-kesultanan Islam di bawah aliansi Sultan Khairun (Ternate) dan Katarabumi (Jailolo) melawan Portugis dan sekutunya. Daerah Mamuya yang penduduknya sudah menjadi katolik, tentu dianggap sebagai sekutu Portugis, sehingga ikut diserang, lalu ditaklukkan. Sebagian terbesar dari mereka kemudian memilih menjadi Islam karena takut, selain untuk menghindari kehancuran lebih besar. Dalam suasana penindasan ini juga, Rm. Vaz tertangkap di suatu desa di pulau Morotai, dan dibunuh sebagai *martir pertama* untuk Gereja Katolik Indonesia.

Sejak peristiwa penganiayaan itu, komunitas Kristiani di sekitar Mamuya seakan-akan raib dari muka bumi. Tidak ada lagi imam di sana, sampai sebelas tahun kemudian P. Fransiscus Xaverius, SJ mengunjungi Moro dan berkarya di sini pada perjalanan misionernya tahun 1546.

Menjelang akhir abad ke-16, pengaruh kekuasaan Portugis melemah di Asia. Sebagai gantinya bangsa Belanda berdatangan ke seluruh Nusantara di bawah bendera VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie* = Persatuan Perusahaan Dagang Hindia Timur, berdiri 1602), gabungan perusahaan-perusahaan dagang dari semacam tujuh "negara provinsi" (sebelum Belanda menjadi Kerajaan Bersatu) yang mayoritasnya Protestan. Pada masa VOC ini (1602-1800) kegiatan agama Katolik dilarang. Bukan itu saja, ada kampung-kampung Katolik yang dihancurkan, umat Katolik tidak diberi hak hidup, para imam yang berkebangsaan Portugis dikejar dan diusir. Hanya beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur yang terus bertahan. VOC berkuasa di kepulauan Nusantara selama dua abad. Dan selama dua abad itu penindasan atas Gereja Katolik terjadi secara masif.

Pada awal abad ke-19, angin pembaruan bertiup, bersamaan dengan bangkrut dan bubarnya VOC, 1 Januari 1800. Kendali atas kehidupan di Nusantara diambil alih oleh Kerajaan Belanda di bawah pimpinan rajanya yang baru, yakni Raja Louis (adik Napoleon Bonaparte dari Prancis). Di bawah pengaruh angin segar dari ide Revolusi Prancis (Kebebasan, Persamaan, Persaudaraan), Pemerintah Kerajaan Belanda pun mulai memperbolehkan para imam Katolik untuk datang di Batavia dan melayani umat Katolik yang tersisa waktu itu. Kebanyakan dari mereka adalah keturunan Portugis dan (bekas) pegawai VOC.

Pada tahun 1808 Raja Louis menetapkan Herman Wilhem Daendels menjadi Gubernur Jendral di Hindia Belanda (1808-1811) dan memerintahkan dia juga untuk memberlakukan kebebasan beragama di semua wilayah kolonisasinya. Dengan demikian, berakhirilah periodisasi monopoli agama Kristen Protestan di Hindia Belanda, setidaknya pada tingkat politis.

Mulai pada masa toleransi ini pula, para misionaris Belanda memulai karyanya secara baru dan terorganisasi, seiring dengan kemajuan zaman di Eropa waktu itu. Semula para imam praja Belanda datang dan melayani umat yang masih terbatas pada umat Eropa, dan indo sebagai "jembatan" menuju pribumi.² Kebanyakan imam berasal dari Belanda Selatan yang kala itu masih merupakan bagian dari Keuskupan Belgia. Mereka kini tersebar di seluruh Nusantara yang luasnya 5.000 km, dengan lautan, hutan dan pegunungannya! Pada mulanya para imam praja ini bekerja dan merintis daerah garapan yang baru dan luas itu. Namun kemudian, setelah sekitar lima dasawarsa bekerja sebagai perintis, mereka mengundang para tarekat misionaris untuk ikut bekerja juga, semula Ordo Ursulin, lalu Ordo Serikat Yesus. Dalam perkembangan selanjutnya, para imam diosesan kembali ke keuskupannya masing-masing. Karya misi pun dilanjutkan oleh tarekat-tarekat misionaris yang datang kemudian.

Masa Kolonial abad ke-20 dimulai dengan iklim politik pemerintah kolonial Belanda yang tampak lebih terbuka dan ramah terhadap rakyat pribumi. Pada Tahun 1901, Ratu Wilhelmina

dari Kerajaan Belanda menyatakan sikapnya: *Sebagai sebuah kekuasaan kristiani* (cetak tebal dari Pen.), *Kerajaan Belanda wajib menyelenggarakan politik pemerintahan di Hindia Belanda dengan kesadaran, bahwa Kerajaan Belanda memiliki kewajiban moral terhadap para penduduk daerah-daerah itu.*³ Di bawah panji kebijakan yang lazim dikenal sebagai “Politik Etis” ini, pelbagai langkah pembangunan dalam aneka bidang diintensifkan oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda, misalnya dalam bidang transportasi (kereta api, jalan), komunikasi (telegram), kesehatan, irigasi, penggarapan lahan-lahan pertanian dengan penyebaran penduduk secara merata (transmigrasi!), pendidikan, terutama pembangunan sekolah untuk kaum pribumi.

Bagi sejarah gereja Katolik sendiri, Politik Etis di awal abad ke-20 kiranya mempunyai tiga dampak penting.

Pertama, Gereja katolik menjadi *partner Pemerintah*, setelah sebelumnya dilarang oleh VOC selama dua abad (awal abad ke-17 hingga awal abad ke-19), dan ditoleransi dengan pembatasan-pembatasan tertentu oleh Pemerintah Belanda (mulai abad ke-19).

Kedua, selain dukungan politik dan subsidi dari Kerajaan Belanda, bantuan *personal dan finansial dari pihak Gereja Belanda* (baca: aneka tarekat imam, bruder, suster) banyak berdatangan, tanpa pembatasan dari pihak Pemerintah seperti sebelumnya. Sama seperti pada abad sebelumnya, banyak misionaris itu berasal dari Brabant Utara dan Limburg, dua provinsi di Belanda Selatan yang mayoritas penduduknya serta kehidupan sosial-politiknya disemangati oleh Katolisisme yang kuat. Ini berbeda dari Belanda Utara yang Protestan dan merupakan asal dari banyak pembesar pemerintah kolonial Kerajaan Belanda, yang dahulu telah menekan daerah-daerah Belanda yang katolik. Asal dari para misionaris ini ikut menentukan juga, mengapa para misionaris asal Belanda-Selatan bisa bersikap anti-kolonial dan berpihak pada kaum pribumi di daerah misi mereka di Nusantara, apalagi mengingat besarnya peran Vatikan (lewat *Propaganda Fide*) sebagai kekuatan internasional yang berpengaruh dalam pengembangan Gereja lokal pada awal abad baru di situ.

Ketiga, dengan demikian, *misi di kalangan pribumi* pada masa politik etis, menjadi lebih mungkin, leluasa dan terfokus berkat dukungan Vatikan dan Pemerintah Belanda itu juga, belum lagi faktor banyaknya tenaga misionaris dari Eropa, terutama Belanda. Pada masa-masa ini, yayasan-yayasan swasta, termasuk misi Katolik dan zending Protestan, khususnya di Jawa dan Madura, mulai menikmati hak-hak dan subsidi-subsidi yang mirip atau sama dengan unit-unit karya milik pemerintah. Begitu misalnya, sekolah guru yang dikelola oleh misi Yesuit di Muntilan 1905 dikabarkan telah mendapat bantuan finansial berupa subsidi dari pemerintah Belanda untuk pembangunan gedungnya, serta untuk tenaga pengajar dan para muridnya.⁴

Kendati demikian, tidak boleh disimpulkan bahwa misi hanyalah kaki-tangan perpanjangan kebijakan pemerintah Kolonial. Sebab bagaimana pun juga ujung-ujungnya, cara pemerintah kolonial menjalankan kebijakan etis ini tetaplah diarahkan *untuk meletakkan seluruh Indonesia di bawah kuasa Belanda, dan mengembangkan negeri dan bangsa di wilayah itu ke arah pemerintahan sendiri di bawah pimpinan negeri Belanda menurut model Barat.*⁵ Hal ini jelas berbeda dari karya misi yang memang menghendaki kemajuan pihak pribumi yang dilayaninya, bahkan juga kalau itu berarti melawan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda.⁶ Yang jelas, pada masa ini misi bisa bekerja dalam suatu konteks sosial-politik yang baru.

Melihat perkembangan sejarah ini, masa empat dasawarsa pertama dari abad ke-20 kiranya bisa disebut sebagai zaman keemasan kemajuan misi, dengan jumlah umat mencapai 637.000 jiwa

(93.000 warga Eropa dan 544.000 pribumi) menurut statistik 1942, sebelum perang.⁷ Zaman keemasan misi yang tercipta antara lain berkat dukungan Pemerintah dan Gereja Belanda, termasuk tarekat-tarekat misi dari Belanda ini kelak mengalami krisis serius dengan datangnya Jepang pada tahun 1942.

Kekuasaan Nippon dan Kebijakan perihal Agama

Beberapa saat setelah Jepang menyerang Malaysia yang merupakan koloni Inggris (8 Desember 1941 – tanggal yang sama saat Pearl Harbor digempur), Pemerintah Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Tanggal 27 Februari terjadi pertempuran Laut Jawa antara kapal Belanda didukung sekutu (Australia dan Inggris) melawan armada Matahari Terbit. Perang berlangsung sengit, mulai sekitar pukul 16:00 hingga 23:30. Malang bagi sekutu. Mereka berhasil dikalahkan. Hari berikutnya mulailah pendaratan tentara Jepang secara besar-besaran di pulau Jawa pada dua tempat, yakni pelabuhan Merak (28 Februari) dan pantai Eretan Wetan, dekat Indramayu (1 Maret). Akhirnya, Minggu, 8 Maret 1942 Pemerintah Kolonial di Hindia Belanda menandatangani surat penyerahan kekuasaan tanpa syarat dari pihaknya kepada Jepang. Hindia Belanda tamat, Jepang jadi pemenang.

Jepang lalu membagi wilayah Indonesia menjadi tiga daerah yurisdiksi militer. Jawa dan Madura diduduki Tentara XVI yang bermarkas di Jakarta, sedangkan Sumatera dan Malaysia (hingga 1943) oleh Tentara XXV yang semula berpusat di Singapura, namun kemudian dipindahkan ke Bukit Tinggi. Tentara XVI dan Tentara XXV membentuk daerah pendudukan dengan pemerintahan oleh Angkatan Darat (*Gunseibu*). Adapun Borneo, kepulauan Nusa Tenggara dan seluruh Indonesia bagian Timur merupakan satu-satunya daerah di Indonesia–bahkan di seluruh Asia Tenggara–yang diduduki oleh AL, dengan Makassar sebagai pusatnya.⁸ Jelas pemerintahan di daerah ini dijalankan oleh AL (*Minseibu*).

Semula kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan penuh kegembiraan oleh orang Indonesia. Namun ini tak berlangsung lama. Sebab undang-undang militer ternyata diberlakukan atas semua bidang kehidupan di Hindia Belanda, dari pembubaran partai politik, larangan berpergian ke luar pulau, pembekuan surat kabar hingga kehidupan beragama. Menyangkut hal terakhir ini Jepang memiliki kebijakan tersendiri. Karakter masa penjajahan Jepang yang singkat, namun keras dan brutal ini perlu dihubungkan dengan kenyataan, bahwa pemerintahan masa Jepang adalah pemerintahan dengan undang-undang ketentaraan.

1. Sikap Jepang tentang Agama

Secara formal, sikap Jepang terhadap agama diatur menurut “Prinsip-prinsip Mengenai Pemerintahan Militer di Wilayah Pendudukan” (*senryōchi gunsei fisisshi yōkō*), 14 Maret 1942, yang berbunyi: *Agama-agama, sebagaimana kebiasaan yang ada dan berlaku, harus dihormati sejauh mungkin untuk menjaga kestabilan pikiran rakyat dan membuat mereka mau bekerja sama* (Kutipan dari Kurasawa, 2015, 303). Dari sini jelas bahwa pada intinya, sikap Jepang terhadap agama-agama bersifat instrumentalistis dan manipulatif. Artinya, agama-agama hanya diperhatikan sejauh membantu kepentingan Jepang dan bekerja sama dengan tujuan propagandanya. Sebaliknya agama akan ditindas sejauh ia dinilai sebagai musuh yang membahayakan kepentingan Jepang.

Dengan pendekatan terhadap agama sedemikian ini, sikap Jepang yang konkrit di lapangan jadi berbeda-beda sesuai kepentingan tadi. Begitu misalnya, terhadap penganut Budhisme dan

Konfusianisme di daerah-daerah pendudukan seperti Birma, Vietnam (dan di daerah-daerah di Nusantara yang memiliki banyak warga dengan kepercayaan ini juga, seperti di Medan dan Pontianak), Jepang mengatakan bahwa orang Jepang memiliki kepercayaan yang sama dengan mereka; jadi dengan demikian ditekankan “persaudaraan iman” untuk mendapatkan dukungan dan solidaritas mereka bagi perjuangan Jepang (Kurasawa, 2016, 172).

Namun terhadap mayoritas orang Indonesia yang beragama Islam, jelas Jepang tak bisa menyebut dirinya “saudara dalam iman”, sebab untuk sebagian terbesar umat Islam pada waktu itu, Jepang sama kafirnya dengan Belanda! Oleh karena itu, di dalam “Prinsip-prinsip Mengenai Pemerintahan Militer di Wilayah Pendudukan” (*senryōchi gunsei fesshi yōkō*) di atas ada tambahan khusus untuk sikap terhadap Islam *Mengenai kaum muslim, harus diberikan perhatian khusus untuk memanfaatkan mereka dalam rangka mencengkeram pikiran rakyat*. Istilah “mencengkeram pikiran rakyat” di sini searti dengan “menguasai dan memakai” rakyat untuk kepentingan propaganda Jepang. (Kurasawa, 2015, h. 303). Oleh karena itu terhadap warga Indonesia dengan mayoritas muslim, Jepang menyebut dirinya sebagai “kakak bangsa Indonesia” (*Indonesia no doubou*), yang datang untuk membebaskan orang Indonesia dari beban penjajahan bangsa Belanda.

Untuk menjalin hubungannya dengan pihak Islam dalam bingkai propagandanya, Jepang mendatangkan dua ulama Islam warga negara Jepang, yakni Haji Abdul Muniam Inada dan Haji Said Salim bin Djendan. Lebih jauh, Jepang kelak mengizinkan Masyumi, bentukan Jepang juga, untuk mendirikan pasukan militernya sendiri yang bernama *Hizbullah* (Laskar Allah). Haji Mohammad Saleh Suzuki, seorang ulama Jepang, ditugasi melatih laskar ini (Muskens, 160). Kelompok-kelompok Islam semacam ini dihidupkan dan dimobilisasi oleh Jepang, namun memang hanya sejauh “bermanfaat” bagi Jepang; begitu organisasi itu dinilai berbahaya, Jepang akan membubarkannya. Contoh: pembubaran MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia), organisasi bentukan zaman kolonial, yang semula diteruskan oleh Jepang, namun lalu dibubarkan dan diganti oleh Masyumi (Majelis Soero Muslimin Indonesia) yang lebih kooperatif terhadap Jepang. (N. Oktorino, 2013, entri “MIAI” dan “Masyoemi”).

Akhirnya kiranya bisa disimpulkan, bahwa pada umumnya umat Islam sangat kooperatif dengan penjajah Jepang. Sebagai akibat kerjasama ini, umat Islam bisa membangun dasar sebagai kelompok yang berpengaruh di bidang politik Indonesia. Dengan kata lain, dibandingkan dengan kehidupannya pada zaman Belanda, umat Islam praktis mengalami perubahan besar dalam perannya terhadap hidup sosial-politik masyarakat pada zaman Jepang (Kurasawa, 2016, 187).

2. Sikap Jepang terhadap Agama Kristiani

Berbeda terhadap Islam, sikap Jepang terhadap agama Kristen-baik Katolik maupun Protestan-sangat keras dan brutal, sebab agama ini dianggap sebagai agama pihak musuh. Contoh paling jelas dari sikap brutal ini adalah eksekusi atas Mgr. Aerts dan tujuh imam Tarekat Hati Kudus (MSC) di Langgur, Kepulauan Kei. Tanpa pembuktian dan pengadilan terlebih dahulu, mereka dibunuh dengan tuduhan telah berkolaborasi dengan tentara Australia. Selain itu salah satu kekhasan pendudukan *Dai Nippon* di Indonesia adalah bahwa mereka menginternir semua warga musuh, baik pejuang maupun sipil, termasuk para misionaris, perempuan dan anak-anak. Dengan sarana dan perbekalan seadanya, mereka semua dimasukkan ke dalam kamp tawanan oleh Jepang yang mau memblokir kegiatan mata-mata dan pemberontakan pada tingkat sekecil apa pun.

Meskipun demikian, di daerah-daerah di mana mayoritas penduduknya beragama Kristen, terutama di Indonesia bagian Timur, Jepang melakukan pendekatan “simpatik” sebagaimana sudah dikatakan di atas. Sama seperti terhadap Islam, Jepang mencoba mengambil hati umat kristiani dengan mengirim tim pendeta Protestan dan rombongan Klerus Katolik.

3. Klerus Jepang untuk Indonesia

Menjawab permintaan Markas Besar AL yang membawahi “Pemerintahan Sipil AL daerah Barat Daya”, termasuk daerah kepulauan Nusa Tenggara, meminta Ketua Majelis Waligereja Jepang, Mgr. Tatsuo Doi (Uskup Agung Tokyo) mengirim imam-imam Jepang ke Indonesia. Hasilnya, delapan klerus Jepang dikirim ke Indonesia. Nama-nama mereka adalah:

No.	Nama	Keuskupan	Efektif Bertugas	Tujuan
1.	Mgr. Yamaguchi Aijirō	Nagasaki	5 Agustus 1943	Flores
2.	Mgr. Ogiwara Akira, SJ	Hiroshima (Administrator Apostolik)	5 Agustus 1943	Flores
3.	RD Kyono Shigeru	Yokohama	Agustus 1943	Flores
4.	RD Iwanaga Rokuro	Nagasaki	Agustus 1943	Flores
5.	P. Koide Tetsuo, SJ	Ordo Serikat Yesus	September (tahun?)	Jawa
6.	RD Kobayashi Arikata	Osaka	Tak ada catatan	Makassar
7.	RD Taniguchi Kenji	Yokohama	Juni 1944	Makassar
8.	RD Nakagawa Toshi	Sapporo	Juni 1944	Sulawesi a.l. Manado

Para imam dari Jepang ini akan berfungsi sebagai *satuan religius untuk misi perdamaian (shūkyō senbuan yōin)* dengan memberikan pelayanan rohani bagi umat Katolik di Indonesia. Jika daftar di atas dilihat dengan seksama, maka tampaklah bahwa tidak ada “satuan religius” yang diutus ke pulau Sumatra. Pulau ini berada di bawah AD XXV yang mengontrol semenanjung Sumatera, Malaysia, dan Singapura sebagai ibu kotanya. Di bawah yurisdiksi ini, *kirisutokyō rengōkai* (Federasi Kristen milik Gereja Protestan) yang sebelumnya diakui sah oleh Jepang, asal pengurusnya tidak pro-Barat, kemudian dilarang melakukan segala aktivitas gerejawi apa pun, termasuk ibadah dan berkumpul. Namun demikian tidak demikian halnya dengan Gereja Katolik. Jepang bersikap relatif sedikit lebih lunak di sini. *Perlindungan diberikan juga terhadap Gereja Katolik Roma. Hanya kebaktian pada perayaan-perayaan misa yang sudah tetap, diizinkan. Untuk sementara waktu, semua kotbah tidak diperbolehkan. Kebijakan ini tidak diberikan untuk permohonan izin menyelenggarakan kembali pendidikan di sekolah-sekolah.*⁹

Krisis Misi Belanda dan Kebangkitan Pribumi

Penguasaan Jepang atas Indonesia (1942-1945) memberikan kesulitan ganda bagi misi Gereja Katolik yang ditopang oleh Belanda. Sebelumnya Belanda diinvasi oleh Jerman. Dampaknya ialah semua bantuan untuk misi dari Belanda tidak dapat lagi dikirim guna membantu kelangsungan karya misi di Indonesia. Sekarang, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, tenaga imam, bruder dan suster yang praktis terdiri dari orang Belanda, diinternir oleh tentara Jepang.

1. Teritori AD XXV: Sumatera dan Sekitarnya

Pada tanggal 28 Desember 1941, kota Medan untuk pertama kalinya dibom oleh pesawat tempur Jepang. Pemboman ini memakan jiwa 30 orang (Kurris 2006, 124). Tiga bulan kemudian pada tanggal 13 Maret 1942 kota itu dan Pematangsiantar diduduki oleh tentara Jepang. Empat hari kemudian, Padang juga mengalami nasib yang sama. Pada tanggal 23 Maret seluruh Sumatera sudah dikuasai oleh Jepang dan dimana-mana tentara Belanda sudah menyerah.

Ada sebuah peristiwa menarik di Pulau Nias. Beberapa saat sebelum Jepang datang, beberapa tokoh di sana yang telah melihat kekalahan Belanda mengumandangkan “Komite Nias Merdeka”. Kemungkinan besar, itulah proklamasi kemerdekaan pertama di Seluruh Indonesia! Walaupun tentara Jepang nanti akan menangkap beberapa orang pencetusnya, tanpa ragu mereka semua melawan tentara kekaisaran “Matahari Terbit” ini untuk melindungi sesamanya (Aster 2008, 135).

Di bawah kekuasaan “Matahari Terbit”, kegiatan misi pun terhambat. Di seluruh Sumatera para imam Belanda diinternir di berbagai tempat. Pelayanan untuk umat terbengkalai. Namun di Sumatera Utara, para misionaris Kapusin sempat melakukan semacam “kursus kilat” kepada beberapa awam untuk nantinya mengambil-alih pelayanan-pelayanan yang bisa mereka lakukan, bila para misionaris sudah ditawan. Tokoh-tokoh awam Katolik inilah yang kelak bekerja bersama dengan tokoh awam lainnya menjadi gembala bagi sesamanya, saat para misionaris ditahan. Di antara mereka, terdapat Bapak Arminius Situmorang (ayahanda dari alm. Mgr. Situmorang, Uskup Keuskupan Padang) yang bekerja di Samosir, dan pasutri P. Datubara (kedua orangtua dari emeritus Uskup Agung Medan, Mgr. Pius Datubara)

2. Teritori Angkatan Darat XVI: Jawa

Keadaan serupa tentu dialami juga oleh misi di Jawa: para imam diinternir, sekolah misi ditutup, gedung-gedung milik Gereja disita. Namun meski keadaannya terpuruk Jepang, Gereja Katolik di pulau Jawa malah bertumbuh dan ditempa menjadi mandiri oleh tuntutan situasi dan kesulitan pada masa Jepang tersebut. Tatkala para misionaris Eropa diinternir dan misi dari Barat praktis berhenti, hal itu malah memberikan kesempatan bagi umat Katolik yang asli pribumi untuk tampil bertanggungjawab dalam kehidupan Gereja di atas kaki sendiri.

Di Jakarta, Mgr. Willekens memang tidak ditawan akibat berhasil meyakinkan perwira Jepang bahwa dia adalah “wakil Paus” yang merupakan sahabat Kaisar Jepang berkat adanya hubungan diplomatik antara Tahta Suci dan Kekaisaran Jepang medio 1941. Namun sebagai orang Belanda, ia tetap berada dalam pengawasan, hal yang tidak memungkinkan keleluasaan gerakannya juga.

Tapi justru dalam keadaan terbatas ini, tampil para awam. Digerakkan oleh rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kehidupan Gereja, mereka terlibat dengan caranya masing-masing merawat iman mereka dan sesamanya. Terkadang mereka justru membantu para misionaris, gembala mereka yang sedang ditawan dengan mengirimkan buku-buku atau makanan. Petrus Kanisius Ojong (kelak pendiri harian Kompas), misalnya, dikenal sebagai “guru ibadat” di daerah Mangga Besar dan sekitarnya. Ia membantu membawakan buku-buku bacaan bagi para imam yang diinternir.

Di Jawa, bahkan di seluruh Indonesia, Mgr. Soegijapranata, Uskup Semarang, merupakan satu-satunya Uskup pribumi kala itu dan tidak ditawan oleh Jepang. Sebagai salah seorang pemimpin orang Jawa yang diharapkan bisa dipakai untuk tujuan propagandanya (seperti halnya

Soekarno!), Jepang bahkan merasa perlu memberikan sikap hormat padanya. Keadaan ini membuat gerak Uskup lebih leluasa dalam reksa pastoralnya. Pada masa pendudukan Jepang ini (1942-1945), Mgr. Soegijapranata berhasil menahbiskan 12 imam praja. Mereka ditugaskan melayani umat yang tersebar Jawa Tengah dan Jawa Timur, hal yang jelas hanya dapat mereka lakukan dengan dukungan para awam.

Mengenai pekerjaan yang dilaksanakan oleh para imam baik imam praja maupun imam pribumi tarekat dan para aktivis awam dalam situasi yang berbahaya itu, Dr. Jos van Baal, SJ, pembesar misi SJ, setelah perang usai (10 September 1945) mengatakan: *Orang-orang Jawa yang tidak ditahan telah meneruskan pekerjaan para misionaris dengan sangat baik: Banyak hal yang perlu disyukuri* (Claverbond, 11). Ini pengakuan tulus yang kiranya jelas juga berlaku untuk mereka yang non-Jawa dan telah berkarya di luar pulau Jawa juga.

3. Teritori Angkatan Laut: Borneo, Kep. Nusa Tenggara dan Indonesia Timur

Selama pendudukan Jepang, umat di **Kalimantan** mengalami berbagai pembatasan seperti di tempat lain. Para klerus dan misionaris diinternir ke Kuching, Malaysia. Jepang terbukti mampu menguasai seluruh penjuru Kalimantan, bahkan dari hilir ke hulu. Setidak-tidaknya, di masa ini perlu ditekankan peranan katekis dan tokoh awam yang menjadi penggembala umat selama para klerus dan misionaris ditahan. Katekis yang tidak digaji ini berjuang *mati-matian* mendampingi dan meneguhkan umat di tengah ancaman diserahkan kepada Jepang. Persekutuan umat pun semakin menguat di tengah tekanan dan kesusahan karena mereka berusaha menjaga iman Katolik yang baru bertumbuh dan meninggalkan adat-adat animistik lama. Di daerah **Sumba** para umat berjuang dalam berbagai keterbatasan dan penderitaan dari kekuasaan Angkatan Laut Jepang. Gereja yang tercerai berai berusaha tetap berdetak dengan bantuan para penolong dan Dewan Gereja. Para penolong sekaligus pengajar agama Katolik harus berjuang mempertahankan iman sekaligus memenuhi kebutuhan hidup karena Jepang tidak memberikan gaji kepada para guru agama. Syukurlah, para umat setempat menghimpun bantuan dan segala kebutuhan hidup bagi para penolong.

Daerah **Sulawesi Selatan**, terutama Pare-pare menjadi pusat kamp tahanan yang sangat memprihatinkan, terutama dengan berbagai pengeboman Sekutu. Kekerasan fisik dan psikis diberikan kepada para tahanan. Di balik penderitaan tersebut, para misionaris Katolik dan pendeta Protestan menyingkirkan "persaingan" di antara mereka dan menjalin kerja sama dalam bidang keagamaan dengan membahas Kitab Suci dan belajar bahasa daerah. Adapun salah satu tokoh awam di daerah Toraja adalah Bp. Felix Dammen (ayahanda dari RD Stanislaus Dammen Ambalinggi', K. Makassar). Ia melakukan perjalanan di daerah Toraja untuk memelihara iman dengan pelayanan Sabda.

Hal serupa terjadi juga di **Sulawesi Utara**, para pendeta Protestan dan pastor Katolik bekerja sama di kamp interniran. Di Keuskupan Manado, RD Nakagawa Toshi, imam praja dari Jepang, melayani umat hingga masuk pedalaman. Mereka dibantu oleh para awam dan guru setempat. Imam ini bekerja bersama umat setempat dengan penuh semangat persaudaraan, misalnya mendirikan gereja atau kapel.

Sebagaimana telah diceritakan di atas penderitaan yang harus dialami Gereja **Maluku-New Guinea** telah menumpahkan darah para martir, yakni Uskup Aerts dan 12 misionaris MSC yang menyertainya. Mereka mendapat tuduhan palsu sebagai kolaborator musuh untuk mencelakakan Jepang. Tanpa ampun, mereka diproses kilat dan dieksekusi di pantai Langgur, 30 Juli 1942.

4. Keuskupan Ende – Sebuah Kekecualian

Kendati mengalami aneka kepahitan perang, kehidupan Gereja di Flores tetap bisa terus dilanjutkan berkat adanya kerja sama dari tiga pihak. Mereka adalah Tim Klerus dari Jepang di bawah pimpinan Mgr. Yamaguchi (Uskup Ende), Mgr. Leven dan para kolega misionaris SVD, dan Kolonel Sato. Yang terakhir ini adalah pimpinan tertinggi Jepang di Flores dan sekitarnya. Ia bukan katolik, namun bersimpati pada Gereja Katolik dan kelak setelah Perang Dunia II akan memutuskan dibaptis menjadi katolik.

Berkat kerja sama mereka pelayanan hidup rohani umat tetap bisa dijalankan, kendati jumlah para pelayannya amat minim. Berbeda dari keadaan di tempat lain, tidak ada penyitaan milik Gereja sama sekali. Selain itu, para misionaris asing yang tersisa tidak jadi diangkut oleh Jepang untuk diinternir di Makassar. Sebagian mereka bisa tetap melanjutkan pekerjaan yang amat penting dalam bidang kesehatan, dan pendidikan di sekolah-sekolah, terutama pendidikan para calon imam di seminari dan novisiat. Akhirnya, perlu dicatat juga, bahwa tokoh-tokoh awam telah bekerja sama dengan para imamnya menjadi gembala bagi sesamanya untuk melangsungkan kehidupan Gereja dengan sarana seadanya. Mereka adalah para katekis di Manggarai, para lulusan Sekolah Guru di Ndonga, Ende, dan aneka kelompok awam (St. Anna, St. Maria, St. Yosef dan Konfreria) di Flores Timur hingga daerah Lamaholot.

Refleksi dan Inspirasi

Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), misi mengalami krisis berat. Kebanyakan wilayah ditinggalkan tanpa pelayan gerejawi. Dengan kekecualian di Flores, semua misionaris Belanda diinternir. Yang bisa bergerak leluasa adalah para pelayan Gereja yang pribumi, yakni Mgr. Soegijapranata, 19 imam, 60 bruder dan 206 suster. Di Pulau Jawa, bekerja 14 imam, di Flores ada 2 imam, juga di Kalimantan terdapat 2 imam, lalu RD Maria Boen (imam praja pertama di Indonesia) bekerja sendirian di pulau Bangka dan Pangkal Pinang.

Dalam masa awal pendudukan Jepang, di Seminari-Seminari Tinggi di Jawa dan Flores ada beberapa frater yang dipercepat penerimaan tahbisannya: 14 di Jawa (dua daripadanya adalah imam praja untuk Vikariat Manado) dan 11 di Flores. Namun, mereka tak bisa diperbantukan lagi ke pulau-pulau lain akibat adanya larangan meninggalkan pulau. Itu berarti, dengan kekecualian adanya satu-dua pastor berkebangsaan Jerman (sekutu Jepang) dan imam pribumi yang tak diinternir di tempat-tempat tertentu. Pada umumnya umat Katolik di pulau Sumatra, Kalimantan Timur, Kepulauan Kei, Tanimbar dan Timor praktis tidak dilayani oleh pastor selama tiga-empat tahun. Dalam situasi darurat itu para katekis, guru, dan tokoh awam setempat harus bekerja secara mandiri, sering tanpa imbalan apa pun. Muskens menulis:¹⁰

Bagi banyak orang Indonesia baik yang Katolik maupun yang non-katolik, pasti dalam tahun-tahun itu sudah menjadi jelas, bahwa menjadi Katolik tidaklah identik dengan menjadi orang Barat. Bukan hanya Uskup mereka di Semarang, imam-imam, para bruder dan suster dari kalangan mereka saja tetap masih bekerja dan mewartakan iman seperti telah mereka jalankan selalu, namun kini seorang Uskup Jepang dan imam-imam Jepang pun (artinya: bukan orang Katolik Barat, Pen) ternyata *toh* bekerja dan berkhotbah persis seperti dijalankan juga oleh rohaniwan Indonesia kini, dan juga oleh imam-imam dan uskup-uskup Belanda sebelumnya.

Yang disebut terakhir adalah rombongan klerus Jepang di bawah pimpinan Mgr. Yamaguchi, khususnya di Flores. Di sini universalitas dan solidaritas Gereja katolik dialami secara nyata: Indonesia, Jepang, Belanda dan Jerman bersatu.

Namun, dicatat juga dengan rasa getir adanya banyak korban dari kalangan pelayan Gereja: 74 imam, 47 bruder dan 161 suster meninggal di tempat-tempat tahanan. Setelah semuanya ini, lantas apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Gereja Katolik pada masa Pendudukan Jepang? Di balik kesuraman dan rasa pilu yang sering secara stereotip dikesankan selama ini tentang kehidupan Gereja pada masa pendudukan Jepang, setidaknya ada lima butir inspirasi yang bisa kita peroleh dari sana.

Pertama, pengalaman hidup Gereja Katolik pada masa pendudukan Jepang telah membangkitkan dalam diri umatnya kesadaran makin kuat sebagai **Bangsa Indonesia** yang sekaligus terbuka pada universalitas bangsa-bangsa. Hal ini sebenarnya tidak serba baru, dan bukan pengalaman “khas” umat Katolik saja, melainkan juga pengalaman warga Indonesia pada umumnya. Dalam pengalaman Gereja Katolik, kesadaran dan pengalaman ini agaknya makin kuat antara lain lantaran karakter universalnya yang sanggup merangkum semua orang mengatasi perbedaan ras dan ideologi yang ada (Belanda, Jerman, Jepang, Cina, Jawa, dan suku-suku lainnya).

Kedua: menyangkut kepemimpinan internal Gereja Katolik tampaklah bahwa **indonesianisasi Gereja Katolik** bergerak semakin progresif di kalangan klerusnya. Jepang memang memblokir karya misi yang waktu itu praktis dijalankan oleh para misionaris Belanda. Namun, mereka mensensibilisasi dan memajukan kesadaran akan keindonesiaan di kalangan bangsa Indonesia pada umumnya, dan di antara umat Katolik pada umumnya. Baru pada masa Jepang mau tidak mau orang dipaksa harus berpikir dan bertindak dalam horizon penentuan nasib bangsa dan Gereja sendiri, terlepas dari ketergantungannya pada bantuan apa pun dari Barat. Hal ini sejalan dengan harapan Mgr. Yamaguchi juga yang pernah diungkapkannya saat mengunjungi Seminari Mataloko (1944): persoalan Gereja Indonesia harus diserahkan kepada orang Indonesia, bukan kepada orang Barat atau Jepang! Dalam Gereja Katolik, hal ini tampak antara lain dari proses dipercepatnya tahbisan imam-imam pribumi di Jawa dan Flores, agar bisa melayani umat di daerah-daerah sendiri dan lintas-Vikariat (*missio domestica*) sejauh dimungkinkan oleh ketentuan Jepang. Kenyataan bahwa imam pribumi mampu bekerja baik meski fasilitasnya sangat minim (tidak setara dengan fasilitas yang bisa diberikan oleh Barat untuk para misionaris mereka di tanah misi) telah mendapatkan pengakuan tulus dari rekan misionaris mereka dari Eropa, seperti telah diuraikan di atas. Hal ini pada gilirannya membangkitkan kesadaran dan sikap percaya diri pada imam pribumi yang nanti di tahun 1970-an mencuat kembali dalam pembicaraan tentang “Indonesianisasi” klerus dan hidup religius serta gerakan inkulturasi.¹¹

Ketiga, seiring dengan itu tampak jelas juga menguatnya tanggung jawab, rasa ikut-memiliki, partisipasi aktif dan **daya merasul kaum awam** dalam Gereja. Sadar bahwa para gembala mereka tidak berdaya lagi akibat tindakan Jepang, kaum awam kini berpartisipasi secara aktif, bahkan mengambil-alih tugas-tugas yang biasa dilakukan para misionaris untuk menghidupkan Gereja, umat Allah. Dibandingkan butir pertama yang baru saja disebut sebelumnya di atas, keadaan yang memperlihatkan peran aktif kaum awam ini bahkan tampak merata dalam kehidupan menggereja di seluruh Nusantara, tidak lagi bisa dibatasi secara khusus di pulau Jawa dan Flores. Dari Vikariat Medan di ujung pulau Sumatera hingga Vikariat Maluku-New Guinea, umat bahu membahu

menjadi gembala bagi sesamanya di masa susah. Kiranya tidak berlebihan, jika Gereja Zaman Pendudukan Jepang adalah Gereja Awam.

Keempat, khususnya di kalangan misionaris dan orang Katolik yang diinternir, ada hal menarik yang pantas diangkat juga sebagai butir inspiratif, yakni semakin **bertumbuh-kembangnya semangat ekumenis** antar sesama orang Kristen. Hal ini pada masa sekarang mungkin sudah dianggap biasa (betulkah demikian?). Namun dahulu, saat Gereja Katolik masih berada dalam konstelasi politik yang tidak mudah antara dirinya dan Pemerintah Kolonial yang beragama Protestan-Kalvinis, hal ini bukan hal yang barang tentu, juga pada saat Politik Etis menjadi latar belakangnya 1930-an. Beban sejarah masa lalu di Belanda sendiri dan kebijakan Pemerintah Kolonial tentang pembagian daerah misi dan zending di Hindia Belanda dengan konsekuensi adanya segregasi antara “daerah Katolik” dan “daerah Protestan”, entah bagaimana membuat hubungan antara Gereja Katolik dan Protestan bukannya tanpa friksi. Tetapi kini pada masa pendudukan Jepang, Hindia Belanda sudah bubar, dan kini mereka memiliki kesulitan dan penderitaan yang sama. Maka kini di dalam kamp, mereka saling menghibur dan menolong serta membangkitkan pengharapan untuk bisa bersama menyita Dai Nippon, dengan kekuatan dari Tuhan sendiri.

Akhirnya perlu dikatakan: semuanya jelas bukan merupakan dalih yang membenarkan penjajahan dan brutalitas Jepang atas bangsa Indonesia pada umumnya, dan atas Gereja Katolik pada khususnya. Pesan utamanya adalah bukan *oleh karena* perlakuan Jepang Gereja Katolik bisa bertahan, melainkan *meskipun* perlakuan Jepang represif dan brutal terhadap umatnya, Gereja Katolik tetap bertahan dan berhasil menyita semuanya ini. Hal ini mungkin sebab Gereja tidak mengandalkan dirinya pada kekuatannya semata-mata, melainkan tahu dan mengandalkan diri kepada siapa, dia percaya: Yesus Kristus sendiri yang dalam menyertai Gereja-Nya sampai pada akhir zaman (2 Timotius 1: 12, dan Matius 28:20).

CATATAN AKHIR

- ¹ Lih. CJ, Böhm, dan F. Pangemanan, *Sejarah Gereja Katolik Maluku Utara*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012). Hal ini tetap dipandang demikian dilihat dari sudut sejarah misi Katolik, kendati data-data historis menunjukkan bahwa pada abad ke-13 dan 14 telah ada kontak dengan Gereja Latin di abad ke-13 dan 14. Lih. A. Meersman, 14-17. Sudah pada zaman Belanda, hal ini diakui oleh Gereja Katolik dengan menerbitkan edisi yubileum 400 tahun misi Katolik di Hindia Belanda dalam *Maandblad Sociaal Leven*, no.15, edisi 2/3, Batavia, 1934. Lalu 8-12 Juli 1984 diadakan PNUKI di Jakarta, dalam rangka 450 Tahun Gereja Katolik di Indonesia: 1534-1884. Jadi secara sadar dipilih tahun 1534, tahun pembaptisan umat Mamuya oleh RD. Simon Vaz, sebagai awal mulainya Gereja Katolik di Indonesia.
- ² Namun di samping para misionaris Belanda, para misionaris imam dioesan dari Prancis yang tergabung dalam *Missions Étrangères de Paris* (MEP, Misi Paris untuk Orang Asing) sudah melakukan karya misinya di kalangan pribumi di Pulau Nias dan Padang sejak 1832.
- ³ Dikutip dari R.Cribb and A. Kahin, 139.
- ⁴ Weitjens, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia* jilid 3b, 853. Juga Steenbrink, 2006 (Jilid II), 179: *Dengan dimulainya Politik Etis tahun 1901, bersama dengan penekanannya yang lebih besar pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat, maka misi menjadi mitra pemerintah Hindia Belanda dalam suatu latar yang baru*. Begitu misalnya, pada tahun 1905, pemerintah Belanda memasok dana 40 juta gulden hanya untuk pembangunan di Jawa dan Madura! Namun ini hanya berlangsung sekitar tiga dasawarsa saja. Krisis keuangan di Belanda pada tahun 1930-an kelak akan memaksa pengurangan bantuan besar-besaran kepada Hindia Belanda ini dan dengan demikian mengakhiri kebijakan etis.

- ⁵ Harry A. Poeze, dalam *Kartini*, 141. Hal senada disampaikan Karlina Supelli ("Menemukan Indonesia, Sebuah Catatan tentang Cuaca Kebudayaan Kita, dalam St. Takdir Alisjahbana Memorial Lecture, Teater Kecil TIM, 4 Okt 2013, 19) yang juga berpendapat, bahwa ikhtiar bangsa Eropa untuk mempercepat proses peradaban model Barat di negara-negara jajahan (dalam hal ini: Hindia Belanda) adalah agar bangsa jajahan ini bisa dimanfaatkan untuk mengolah alam mereka demi kepentingan penjajah Kolonial Belanda yang paternalistik dan diskriminatif.
- ⁶ Ini tampak jelas pada tokoh P. Frans van Lith, SJ (Lahir Oirschot, kota kecil di provinsi Katolik Brabant, 1863 - wafat di Semarang, 1926) yang terkenal dengan pernyataannya *Setiap orang sekarang tabu, kami sebagai misionaris ingin bertindak sebagai penengah; tetapi setiap orang tahu juga, bahwa seandainya terjadi suatu perpecahan, meskipun hal itu tidak kami harapkan, sedangkan kami terpaksa memilih, kami akan berdiri di pihak golongan pribumi* (dikutip dari H. Boelaars, *Indonesianisasi*, 109).
- ⁷ Sumber: P. Zwaans, SJ, *Claverbond*, 1948, 220.
- ⁸ Ditetapkan berdasarkan "Kesepakatan Pusat antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut menyangkut Administrasi Pemerintahan Militer di Daerah-daerah Pendudukan" (*senryōchi gunsei fssbi ni kansurru rikukaigun Chūo Kyūtei*, 12 November, Shōwa 16 [1941] "Dokumen Pemerintahan Militer di Malaysia" (*marei gunseikanbu chōsabu*), seperti dikutip oleh Hara (1997), 89.
- ⁹ *Gunseika ni okeru shūkyō tasaku no keika* (peraturan tentang pembatasan keagamaan di bawah administrasi militer), dalam: Dokumen Pemerintahan Militer di Malaysia [*Marei gunseikanbu chōsabu*], sekarang berada di Perpustakaan Pasukan Beladiri Jepang di Tokyo, seperti dikutip Hara (1997, 90).
- ¹⁰ Muskens, *Partner in Nation Building: The Catholic Church in Indonesia*, 1979, 168.
- ¹¹ Tentang hal ini lihat Harjawiyata, Frans, dkk., *Hasil Konggar IV: Jakarta, 6-14 September 1978*, Jakarta: Varia Warna, 1978, 129. Juga SP. Lili Tjahjadi, *Mission Breakthrough: Narasi Kecil Imam Diosesan di Indonesia*, Jakarta: Obor, 2014, khususnya 81-86.

DAFTAR PUSTAKA

- AJAK 753.KDC.8. *Bezetting door de Japanner*, Arsip Keuskupan Agung Jakarta, 1942-46.
- Aster, P. Gentilis, *Mukjizat di Tanah Batak: Awal Misi Katolik di Tanah Batak (1934-1959)*, (penerjemah: P. Leo Joosten, Kabanjahe), tanpa keterangan Penerbit.
- Aritonang, Jan S., *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.
- Bank, Jan, *Katolik di Masa Revolusi Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 1999.
- Boelaars, Huub, *Indonesianisasi: Dari Gereja Katolik di Indonesia menjadi Gereja Katolik Indonesia*, (penerjemah: Hardawiryana, SJ), Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Böhm. CJ dan Pangemanan, F., *Sejarah Gereja Katolik Maluku Utara*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Budi Subanar, G., *Soegija Si Anak Betlehem van Java: Biografi Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Claverbond, "Berichten uit Oost-Indie: Voor de Leden van den St. Claverbond," 54ste Jaargang 1946, Nijmegen, 1946.
- Cornelissen, Frans, *Lima Puluh Tahun Pendidikan Imam di Flores, Timor dan Bali*, Ende: Arnoldus, 1978.
- Hara, Makoto, "Nihon gunseika no Indoneshia no Katorikku - Fururesu-tō chūshin ni," *Kirisutokyō Kenkyū* 57 (1995): 25-39.
- Hara, Makoto, "Christianity in Indonesia under Japanese Military Rule," *Japanese Religion* 22 (1997).
- Kap en Koord, "Kapucijnen in de Oorlog," 54ste Jaargang, Nr.3, Aug 2014, Hoogvliet, 2014.

- Kurasawa, Aiko, *Masyarakat dan Perang Asia Timur Raya: Sejarah dengan Foto-foto yang tak Terceritakan*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2016.
- Kurris, Ruud, *Pelangi di Bukit Barisan: Gereja Katolik Memasuki Tapanu*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Mangunwijaya, YB., *Gereja Diaspora*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Muskens, M.P.M., *Partner in Nation Building: The Catholic Church in Indonesia*, Aachen: Missio Aktuell Verlag, 1979.
- Oktotino, Nino, *Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Rhenani, Libelli, *Geschichte der Kirche in Japan: Zum 50jährigen Bestehen der Partnerschaft der Erzdiözesen Köln und Tokyo*, Köln: Dombibliothek, 2005.
- Sato, Tasuku, *I Remember Flores*, (translated by M. Tennien), New York: Startford Press, 1957.
- Spae, Jozef, "Japan: Christendom voor en tijdens de Oorlog," *Claverbond*, 1948.
- Tjahjadi, SP. L., *Mission Breakthrough: Narasi Kecil Imam Diosesan di Indonesia*, Jakarta: Obor, 2014.
- Tjahjadi, SP, L., *Surviving the Dai Nippon: Gereja Katolik Indonesia Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)*, Jakarta: Obor, 2018.



MEMBANGUN GEREJA SEBAGAI GERAKAN YANG CERDAS DAN SOLIDER

Apresiasi Terhadap Kegembalaan
Ignatius Kardinal Suharyo

Kiranya kini umat di ibukota pun prihatin dan menjadi aktif, kalau di pulau-pulau luar itu alam-*raya* dirampas habis. Umat di ibu kota mendengar sapaan ilahi (menjadi *the Hearer of the Word*) dan tidak dapat mendiampkannya lagi kalau di macam-macam perkara lokal kita menghadapi masalah yang sama. – **B. Kieser SJ**

Para murid Kristus tidak dipanggil dan diutus untuk menyelesaikan segala masalah yang ada di dunia, melainkan untuk bersaksi dengan menempuh jalan Yesus demi terwujudnya Kerajaan Allah. Selayaknya semua murid-murid Yesus bersama Romo Kardinal mencita-citakan Gereja sebagai persekutuan dan Gerakan Kerajaan Allah. – **JB. Banawiratma**

Melalui pemahaman Gereja sebagai suatu paguyuban dan gerakan seperti dinyatakan oleh Ignatius Kardinal Suharyo, kita dibantu untuk tidak berpikir statis ataupun menurut model kacamata kuda, melainkan kita diundang untuk berpikir dinamis dan terbuka terhadap macam-macam model penggembalaan atau pelayanan umat beriman di tengah pluralitas masyarakat yang terus berubah ini. – **E. Martasudjita, Pr.**

Visi Kardinal Suharyo mengundang Gereja untuk menjadi kekuatan dinamis dalam masyarakat yang semakin urban dan semakin kompleks. Urbanitas akan menjadi konteks hidup yang semakin penting di Indonesia, juga di Asia, sebagai akibat dari fenomena besar urbanisasi dan migrasi. – **A. Bagus Laksana, SJ**

Sebagaimana al-Qur'an mengakui adanya rasul di luar *list* eksklusif agama, al-Qur'an juga mengakui adanya orang-orang yang menempuh penderitaan seperti para rasul dalam usaha mereka membawa manusia keluar dari korupsi dan penumpahan darah, mereka yang ingin menyebarkan keadilan dan kasih di antara umat manusia. – **Syafa'atun Almirzanah**

Di dalam masyarakat yang baru ini tidak ada lagi batasan yang jelas antara apa yang nyata dengan apa yang virtual. *Kirliche Gemeinschaft* atau *Churches' Community* atau Paguyuban Gerejawi bisa berkembang kalau disadari bersama bahwa *sense of community* atau *sense of Churches Community* dapat bertumbuh dan berkembang melalui baik virtual maupun nyata. – **Francisia S. S. E. Seda**



Sanata Dharma University
Press

ISBN 978-623-7379-74-4



7 786237 379744